



Buletin Parlementaria

Nomor 1069/II/IX/2019 • September 2019



DPR Ajak Parlemen Dunia Komitmen Wujudkan SDGs



9 772614 339005



6 Jangan Ada Mobilisasi Internasional pada Kasus Papua



16 UU Peksos Berikan Kepastian Hukum Profesi Pekerjaan Sosial

DPR Ajak Parlemen Dunia Komitmen Wujudkan SDGs

THE 3rd WORLD PARLIAMENTARY FORUM ON
SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Combating Inequality through Social and Financial Inclusion

4 - 5 September 2019 | Bali-Indonesia



Foto bersama Pimpinan DPR RI, Wakil Presiden RI, Pimpinan BKSAP DPR RI, Gubernur Bali, dan seluruh delegasi pada WPFSD ke-3 di Bali. Foto: Oji/HR

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengajak delegasi parlemen dunia yang hadir pada kegiatan *World Parliamentary Forum Sustainable Development (WPFSD) ke-3* untuk berkomitmen mewujudkan yang sudah tertera pada Tujuan Pembangunan Berkualitas (TPB) atau *Sustainable Development Goals (SDGs)*. WPFSD merupakan forum parlemen dunia

inisiasi DPR RI untuk fokus kepada peningkatan peran parlemen dalam pencapaian TPB.

Demikian dikemukakan politisi yang akrab disapa Bamsuet itu saat membuka kegiatan WPFSD ke-3 dengan mengangkat tema '*Combating Inequality Through Social Financial Inclusion*'. Menurutnya tema ini sejalan dengan isu strategis yakni mengenai masalah kesenjangan yang terjadi di

berbagai belahan dunia. Turut hadir dalam pembukaan ini, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, Gubernur Bali I Wayan Koster, Pimpinan DPR RI, serta Pimpinan dan Anggota BKSAP DPR RI.

"Saya berpendapat bahwa TPB merupakan komitmen global untuk mencapai masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan untuk semua, dan bertujuan untuk mengatasi tantangan global seperti kemiskinan, ketimpangan,

iklim, degradasi lingkungan, kemakmuran, perdamaian dan keadilan,” ujarnya dalam pidato pembukaan WPFSD di Bali, Rabu (4/9).

Politisi Partai Golkar ini menjelaskan bahwa ketimpangan menghadirkan tantangan dalam perwujudan hak asasi manusia. Dampak ketimpangan pada masyarakat menurutnya dapat sangat parah, terutama menciptakan dan meanggengkan kemiskinan serta marginalisasi, sehingga menyebabkan konflik.

Bamsoet menegaskan untuk merespons kondisi ini, parlemen dengan fungsinya berperan penting dalam memastikan komitmen pembangunan seperti yang tertera pada TPB dapat tercapai. *No One Left Behind* menurutnya bermakna *No Parliament Left Behind*, dengan arti parlemen harus selalu terlibat aktif dalam seluruh upaya capaian TPB.

Legislator dapil Jawa Tengah VII itu memastikan Indonesia sangat berkomitmen terhadap suksesnya implementasi SDGs karena nilai yang terkandung di dalamnya sejalan dengan fokus kebijakan Indonesia dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Salah satunya dengan memberikan akses permodalan kepada 58 juta lebih UMKM yang mempekerjakan 89 persen tenaga kerja sektor swasta, dengan berkontribusi 60 persen terhadap PDB.

Sementara itu dalam pidatonya, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla meminta kepada seluruh delegasi yang hadir pada WPFSD ke-3 untuk terus meningkatkan kerja sama kemitraan terutama dalam mencapai SDGs tahun 2030. Parlemen, menurutnya, memiliki peran penting baik dalam legislasi, penganggaran dan pengawasan program pembangunan suatu negara. Apalagi di dalam negara yang menganut paham keseimbangan antara eksekutif, legislatif, yudikatif seperti Indonesia.

“Karena itulah maka usaha kita untuk mencapai tujuan-tujuan dari pada SDGs sangat mulia, apakah itu mengurangi kemiskinan, *inequality, economi*

growth, gender, kesehatan, *clean water* ataupun *clean energy*, infrastruktur dan lainnya, semuanya sangat penting bagi suatu negara,” ungkap JK, sapaan akrab Wapres Jusuf Kalla.

Wapres JK mendorong agar delegasi parlemen dunia yang hadir, untuk aktif berpartisipasi dalam diskusi yang menjadi rangkaian para agenda WPFSD 2019. Hal ini juga dikarenakan faktor parlemen yang memiliki kewenangan salah satunya dalam hal *budgeting* (anggaran) tentunya sangat penting untuk mengurangi kesenjangan atau ketidakadilan serta meningkatkan kemampuan masing-masing Negara.

Di sela-sela agenda WPFSD ke-3, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon juga melaksanakan sejumlah pertemuan bilateral dengan parlemen dari beberapa negara dan organisasi, seperti Parlemen Korea Selatan, *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) Countries Parliamentary Network*, Timor Leste serta Qatar. Pertemuan tersebut membahas potensi kerja sama yang bisa dikembangkan antara Indonesia dengan negara-negara tersebut.

Sementara itu, Ketua BKSAP DPR RI Nurhayati Ali Assegaf mengatakan, selama pertemuan WPFSD, seluruh delegasi dapat berbagi pengalaman yang bisa dijadikan rujukan atau pembelajaran masing-masing negara. Kontribusi dan rekomendasi yang dihasilkan dari diskusi akan sangat bermanfaat, dan sebagai masukan agar parlemen lebih terlibat dalam pembangunan global dan memastikan *goals* SDGs diterapkan dengan baik.

“Oleh karena itu, pada pertemuan ini, kami berharap parlemen-parlemen anggota WPFSD dapat memainkan peran dalam mendorong untuk memberikan kesempatan yang sama dan mengurangi ketidaksetaraan, dengan mempromosikan kebijakan dan tindakan yang sesuai dengan agenda 2030,” imbuhnya. ■ er.es/sf



PENGAWAS UMUM
Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAH
Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

WAKIL KETUA PENGARAH
Dra. Damayanti, M.Si (Deputi Persidangan)

PIMPINAN PELAKSANA
Y.O.I Tahapari, S.H, M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI
Drs. Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)

W.K PIMPINAN REDAKSI
Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak)
Suciati, S.Sos. (Kasubag Media Analisis)
Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag MedSos dan Website)

REDAKTUR
Erman Suhendri, S.Sos.I, Sofyan Efendi

REDAKTUR FOTO
Eka Hindra

SEKRETARIS REDAKSI
Guntur Dewanto, Hasri Mentari

ANGGOTA REDAKSI
Agung Sulistono, S.H., Rizka Arinindya, S.Sos., Erlangga Panji Samudro, S.Ikom, Alfi Widoretno, S.I.Kom, Natasya Amanda P, S.Kom, Rahayu Setyowati, Muhammad Husen, Virgianie Meiske Patuli, Ria Nur Mega, Devi Iriandi, Hendra Sunandar, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrullu, Purntho Pranowo, Singgih Kinanti Rimbani, Siti Nadiah, Riyan Hidayat, Nafisa Hanum Alayudrus, Larissa Amanda Indianti, Mohammad Rizki Nugraha.

FOTOGRAFER

Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah
Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Arief Rachman,
R. Kresno PD. Moempoeni, Azka Restu Afidhillah,
Gerald Opie.

ANALIS MEDIA
Ahyar Tibi, Deprisa Citra Akbari, Sunarya,
Fahmi Harfa, Safitri Restu Widoywati

INFOGRAFIS
Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia,
Dipa Natalio, Fajar Suryanto.

ADMINISTRASI
Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN
Dadang Prayitna, S.IP., M.H. (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI
Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

FOTOGRAFER ART
Friederick Munchen

DESAIN GRAFIS
Dito Sugito

STAF PRODUKSI

Subadri, S.E, Barliansyah, Fathurahman
PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI
Eko Priyanto, S.E. (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Maria Dumaris Simanjuntak, S.E, Yudi Kresna

ADMINISTRASI
STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Arif, Lamin, Yuliana Puspita
Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421
Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN
HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL Cetak dan Distribusi (GRATIS)

DPR Sahkan RUU Pekerja Sosial

Rapat Paripurna Masa Persidangan I Tahun Persidangan 2019-2020 dipimpin Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pekerja Sosial (RUU Peksos) menjadi Undang-Undang. Sebelum RUU ini disetujui, Utut menanyakan kepada seluruh Anggota Dewan yang hadir pada Rapat Paripurna.

“Apakah RUU tentang Pekerja Sosial dapat disetujui untuk disahkan menjadi UU?” tanya Utut, yang kemudian dijawab “Setuju” oleh seluruh Anggota Dewan yang hadir dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (3/8).

Sebelumnya, Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher Parasong dalam laporannya mengungkapkan, pertimbangan Komisi VIII DPR RI melakukan inisiasi dan mengusulkan RUU Pekerja Sosial adalah untuk memberikan jawaban atas permasalahan terhadap kebutuhan pekerja sosial, sebagai salah satu sumber daya manusia penyelenggara kesejahteraan sosial di Indonesia.

“UU ini makin mendesak, mengingat masalah yang dihadapi bangsa ini makin kompleks. Mulai dari kemiskinan, keterpinggiran, korban bencana, korban kekerasan dan masalah kesenjangan sosial, hingga perubahan sosial ekonomi dan politik, globalisasi dan revolusi industri 4.0 yang membawa dampak sosial yang luar biasa,” ungkapnya.

Namun sayangnya, tambah Ali Taher, jumlah pekerja sosial yang ada baru sekitar 15.552 orang, sedangkan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) tahun 2012 sekitar 15,5 juta rumah tangga. Secara rasio perbandingannya 1 pekerja sosial melayani 1000 PMKS, padahal idealnya 1 pekerja sosial melayani 100 PMKS.

Untuk itu, masih kata politisi F-PAN itu, lahirnya RUU tentang Pekerja Sosial

akan memberikan pengakuan legal dan formal terhadap pekerjaan sosial sebagai suatu profesi yang mempunyai tanggung jawab, hak dan kewajiban serta kewenangan sepenuhnya di Indonesia.

“Pekerja sosial dengan basis profesional yang kuat mulai saat ini menjadi aset yang penting dalam konteks pembangunan sosial dan persaingan baik nasional, regional maupun global. Pekerja sosial dengan kompetensinya membantu mengantisipasi, memecahkan masalah secara efektif, dan memberikan perlindungan, sehingga dapat hidup layak dan menjalankan keberfungsian sosial,” jelas Ali Taher.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita dalam pidato mewakili pemerintah mengatakan, pada dasarnya pemerintah memiliki

pandangan yang sama dengan DPR RI terkait masalah kesejahteraan sosial. Agus berharap UU Pekerja Sosial dapat menjadi instrumen hukum untuk meningkatkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Agus menambahkan, pekerja sosial telah memberi kontribusi untuk mencegah disfungsi sosial, maka diperlukan payung hukum terhadap keberadaan para pekerja sosial dalam melaksanakan prakteknya. Pemerintah berpendapat UU ini merupakan langkah maju dalam upaya membangun SDM pekerja sosial yang profesional.

“Kami memiliki keyakinan bahwa produk legislasi yang disepakati bersama akan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pekerja sosial. Pemerintah siap untuk menjalankan dan melaksanakannya agar kesejahteraan pekerja sosial lebih baik,” imbuh Agus. ■ rmm/sf



Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher menyerahkan dokumen RUU Peksos pada Pimpinan DPR RI. Foto: Jaka/HR

'Gowes Sehat DPR' Ajak Masyarakat Hidup Sehat



Suasana Ketua DPR RI Bambang Soesatyo melepas peserta "Gowes Sehat DPR". Foto: Arief/HR

DPR RI menyelenggarakan Pesta Rakyat sebagai rangkaian kegiatan HUT-nya ke-74. Pesta Rakyat diawali dengan lomba sepeda bertema 'Gowes Sehat DPR Bersama Rakyat' diikuti oleh 1000 peserta, dengan *start* di Kompleks Parlemen, berputar di kawasan Gelora Bung Karno, dan *finish* di Gedung Nusantara IV DPR RI, Senayan, Jakarta. Ketua DPR RI Bambang Soesatyo secara langsung membuka acara ini.

Dalam sambutannya, Bamsuet, sapaan akrab Ketua DPR RI itu mengajak masyarakat untuk menjalankan pola hidup sehat serta mengurangi polusi udara dengan bersepeda. Diketahui dalam lingkungan perkotaan seperti Jakarta didominasi kendaraan berbahan bakar bensin yang menyebabkan polusi udara menjadi sangat tercemar.

"Diharapkan dengan adanya lomba Gowes Sehat ini masyarakat akan membiasakan diri bergaya hidup sehat, juga dapat membantu mengurangi pencemaran udara yang kita ketahui sangat mengganggu akhir-akhir ini. Bersepeda banyak manfaatnya sadar atau tidak sadar stamina akan lebih kuat, lebih berotot dan lebih bugar," ucap Bamsuet, yang turut didampingi Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar beserta jajaran pejabat lingkungan Setjen dan BK DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (31/8).

Politisi Partai Golkar tersebut menjelaskan bahwa setiap tahunnya DPR RI selalu menyelenggarakan kegiatan bersama masyarakat di setiap ulang tahunnya. Menurutnya ini membuktikan bentuk DPR sebagai wakil rakyat yang selalu berusaha mendekatkan diri serta terbuka kepada masyarakat Indonesia.

"Ini merupakan momentum HUT ke-74 DPR yang luar biasa. Ini adalah rumah rakyat, maka terbuka bagi seluruh rakyat untuk masuk ke dalam gedung ini. Jangan hanya mau demo saja baru ke sini. Jadi kalau bersenang-senang, berolahraga, dan bertemu wakil rakyat, silahkan, gedung ini sangat terbuka," sebut Bamsuet.

Politisi dapil Jawa Tengah VII ini menambahkan, bahwa DPR RI telah melakukan berbagai langkah-langkah untuk menjaga agar pembangunan yang dilaksanakan pemerintah tetap terjaga dengan baik. Menurutnya sebagai lembaga legislatif, DPR RI akan terus mendorong kinerja pemerintahan hingga akhir masa jabatan.

"Akan ada wajah-wajah baru di DPR, tapi dalam komposisi kepartaian fraksi kepartaian, politik tidak akan banyak berubah. Artinya 5 tahun ke depan tidak akan banyak terjadi perubahan. Kita tetap menjadi pengawas pemerintah, menyiapkan undang-undang yang dibutuhkan pemerintah dan rakyat sekaligus juga membahas dan menyetujui anggaran-anggaran yang dibutuhkan oleh pemerintah," jelas Bamsuet.

Sementara itu, Sekjen DPR RI Indra Iskandar dalam sambutannya berharap pada usianya yang ke-74, DPR RI dapat mentransformasikan dirinya untuk menjadi lembaga yang terus pro rakyat. Dalam hal ini upayanya adalah mempermudah akses baik kunjungan secara langsung maupun secara digital. Pihaknya akan terus mengaplikasikan visi pimpinan Dewan, yaitu menjadikan DPR RI sebagai lembaga yang terbuka untuk umum.

"Jadi masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya. Selain itu dalam bentuk digital juga sudah kita upayakan. Jadi tidak hanya secara langsung tapi dalam akses digital juga kita berikan," ucap Indra. Selain 'Gowes Sehat DPR Bersama Rakyat', rangkaian kegiatan lainnya yakni Lomba Panjat Bambu Betung, Lomba Mewarnai Bagi Anak-anak, dan pentas Dangdut Pro-Rakyat yang seluruhnya digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. ■ er/sf

Jangan Ada Mobilisasi Internasional pada Kasus Papua

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengungkapkan, ada pihak-pihak yang ingin mengacaukan Papua, terutama dunia internasional yang tidak suka dengan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh sebab itu, ia berharap Presiden Joko Widodo mengambil langkah strategis dan menciptakan tindakan yang benar-benar cermat dan luar biasa.

“Sekali lagi, pihak pemain di kasus Papua selalu banyak, terutama pihak internasional yang selalu ingin agar kedamaian dan stabilitas di Papua itu tidak pernah selesai,” tandas Fahri dalam siaran persnya yang diterima *Parlementaria*, Jumat (30/8).

Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) itu berharap, Pemerintahan Presiden Jokowi jangan sampai terlambat mengatasi masalah Papua. Karena penyelesaian atas akibat selalu ada diakhir. Terlebih ada pihak-pihak yang mencoba melakukan mobilisasi dukungan internasional terkait insiden itu.

“Jika Presiden terlalu datar membuat pernyataan, sementara orang sudah bertindak jauh, termasuk adanya pihak yang mencoba menginternasionalisasi persoalan ini, nanti kita menyesal karena terlambat,” pesan Fahri.

Ia juga mengatakan, Presiden Jokowi seharusnya bisa mengeluarkan langkah dan kebijakan yang luar biasa agar kericuhan di wilayah itu dapat berakhir. “Perkembangan terbaru di Papua itu sesungguhnya memerlukan langkah-langkah yang luar biasa dari Presiden, tidak bisa Presiden hanya mengeluarkan imbauan-imbauan yang datar ya, dalam situasi seperti sekarang,” papar Fahri.

Fahri mengatakan seharusnya

”

**...PEMERINTAHAN
PRESIDEN JOKOWI
JANGAN SAMPAI
TERLAMBAT MENGATASI
MASALAH PAPUA.**

Pemerintah bisa memberikan pesan yang substansial yang mampu membekas hingga ke relung hati seluruh masyarakat Papua. Fahri menyarankan Jokowi bisa menjelaskan secara gamblang dan terukur berbagai rencana strategisnya dalam membangun kepercayaan masyarakat Papua kembali usai insiden tersebut. Hal itu bertujuan agar situasi di Papua kembali kondusif dan tak ada kerusuhan lanjutan.

“Sambil tentunya mendengar apa yang sekarang dalam jangka pendek dituntut oleh masyarakat dan lalu kemudian kita mencoba membangun pengertian jangka panjang tentang keadaan kita,” ungkap legislator dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) itu.

Fahri mengatakan, Presiden Jokowi sebagai Presiden memiliki tugas berat. Karena Pusat Pemerintahan Jakarta dan Papua tidak hanya mengandung jarak fisik, melainkan jarak psikologis yang harus dijabatani. “Jarak antara Jakarta dan Papua itu tidak mengandung jarak fisik, tetapi juga mengandung jarak-jarak lain,” jelasnya.

Fahri menambahkan, permasalahan Papua menjadi tugas berat pemimpin Indonesia, karena memiliki luas wilayah dan disparitas, baik fisik maupun non fisik yang tidak sederhana. “Termasuk jarak psikologis dan lain sebagainya,



Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah. Foto: Gerald/HR

yang semuanya harus dijabatani dengan rencana-rencana yang luar biasa,” tuturnya.

Hingga Kamis (29/8/2019) malam, kondisi Kota Jayapura masih mencekam. Dilansir dari pemberitaan media nasional, warga secara bergiliran meronda sejak malam hari dalam keadaan gelap dan tanpa adanya jaringan komunikasi di Distrik Jayapura, Kota Jayapura. Sebagian besar warga lainnya masih bertahan di kantor atau fasilitas milik negara lainnya karena tidak dapat pulang ke kediamannya, ketika situasi belum bisa dipastikan kondusif. ■ eko/sf

Komisi I Dorong Kopassus Tingkatkan Peralatan Alutsista



Wakil Komisi I DPR RI Asril Hamzah Tanjung memimpin Tim Kunspek I DPR RI ke Markas Grup 1 Kopassus, Serang, Banten. Foto: Andri/HR

Wakil Komisi I DPR RI Asril Hamzah Tanjung mengatakan, sebagai prajurit khusus yang berstandar internasional, Komando Pasukan Khusus (Kopassus) harus dilengkapi dengan peralatan alutsista tempur yang modern. Ia menyarankan Grup 1 Kopassus Kota Serang, Provinsi Banten, mempunyai helikopter, sehingga dapat menjangkau ibu kota lebih cepat jika terjadi kerusakan atau kekacauan yang memerlukan tindakan cepat.

“Selama ini (Kopassus) hanya mengandalkan kendaraan darat yang jarak tempuhnya cukup lama. Untuk itu, Komisi I DPR RI mendorong Kopassus untuk mengajukan fasilitas alutsista yang dimaksud. Tidak hanya itu, Kopassus juga harus mempunyai *drone*

tempur guna mempermudah tindakan operasi,” kata Asril saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI ke Markas Grup 1 Kopassus, Serang, Banten, Kamis (29/8).

Di sisi lain, politisi Partai Gerindra itu juga mendukung peningkatan kesejahteraan prajurit. Menurutnya, kesejahteraan adalah poin penting dalam pengumpulan prajurit yang profesional. “Kalau SDM (Sumber Daya Manusia) bagus, tapi tidak sejahtera, *kan* percuma. Insya Allah, sebagai Anggota Komisi I DPR, saya akan terus mendorong ke arah (kesejahteraan) itu, baik dari sisi regulasi maupun dari dukungan anggarannya,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama Danjen Kopassus Mayor Jenderal TNI I Nyoman Cantiasa mengatakan,

institusinya mendapatkan alokasi alutsista setiap tahun. Ia mengatakan, kemampuan Kopassus tidak akan maksimal jika hanya berharap pada kualitas prajurit. “Saya berharap ada perbaruan alutsista setiap tahun, tidak hanya sumber daya manusianya bagus, tapi juga didukung alutsista,” katanya.

Lebih lanjut ia menuturkan, alat angkut dan senjata merupakan dua alutsista yang saat ini dibutuhkan. Ia menambahkan, pembelian alutsista itu perlu persetujuan Komisi I DPR RI. “Sudah ada perencanaan yang kami ajukan ke kementerian dan itu akan dibawa ke DPR. Nanti DPR yang akan mengesahkan. Saya berharap dengan kedatangan Komisi I DPR ke Markas Grup 1 Kopassus ini dapat memperjuangkan hal tersebut,” harapnya. ■ *man/sf*

RUU Pertanahan Beri Kepastian Hukum pada Rakyat

Ketua Panitia Kerja Rancangan Undang-undang (RUU) Pertanahan DPR RI Herman

Khaeron menegaskan bahwa RUU Pertanahan sejatinya ditujukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya pada rakyat, dengan memberikan rasa keadilan, kepastian investasi dan kepastian hukum.

“Karena bagaimanapun juga tanah sebagai aset utama, baik perorangan maupun badan hukum yang harus dijamin kepastiannya oleh negara, sehingga kami juga memperkenalkan *ste/ser/ positif*,” ujar Herman, usai sosialisasi dan diskusi RUU Pertanahan di Universitas Gadjah Mada (UGM), DI Yogyakarta, Senin (3/9).

Dalam kesempatan itu, Pakar

Agraria UGM Prof. Nur Hasan Ismail menilai masih ada inkonsistensi dalam RUU Pertanahan ini. Salah satunya yang tidak menyinggung soal kepemilikan bersama hak atas tanah.

Dijelaskan Hero, begitu Herman Khaeron biasa disapa, ia ingin undang-undang ini partisipatif, artinya semua pihak ikut berpartisipasi memberikan masukan dan pendapat untuk RUU ini. Meskipun masing-masing pihak memiliki interpretasi yang berbeda-beda sesuai bidang dan disiplin ilmunya masing-masing.

Namun bagi politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini, sebagai Ketua Panja hal tersebut menjadi sebuah masukan yang akan disampaikan kembali dalam rapat Panja bersama



Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron.
Foto: Ayu/HR

pemerintah. Dan pihaknya juga akan berusaha semaksimal mungkin untuk terus melengkapi atau menyempurnakan RUU tersebut. ■ ayu/si

RUU Pertanahan Jawaban Atas Masalah Pertanahan

pertanahan, sengketa konflik perbatasan antara kawasan hutan dan kawasan non-hutan, kepastian hukum dan kemudahan berinvestasi.

“RUU Pertanahan ini merupakan *Lex Specialis* dari UU No.5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria untuk memperkuat dan menga-tasi berbagai permasalahan pertanahan yang ada,” kata Mardani saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi II DPR RI ke Provinsi Kalimantan Timur, dalam Rangka Sosialisasi Perkembangan Pembahasan RUU tentang Pertanahan, Senin (2/9).

Legislator Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyebutkan terdapat beberapa poin perubahan pada konsep RUU tentang Pertanahan ini yang menjadi isu krusial, yaitu: definisi tanah yang diperluas, hak atas ruang bawah tanah dan di atas tanah, hak milik warga negara asing atas satuan rumah susun (Sarusun),

jangka waktu Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), dan hak pakai, Pengadaan Tanah dan Bank Tanah, Badan Penjamin Sertifikat, serta Pengadilan Pertanahan.

Berdasarkan banyaknya kasus Pertanahan yang tidak dapat terselesaikan dengan tuntas serta perlunya perlindungan tanah untuk kepentingan bangsa Indonesia untuk itu, lanjut Mardani, DPR RI mengusulkan membentuk tiga lembaga baru, yaitu: Bank Tanah, Badan Penjamin Sertipikat, dan Pengadilan Pertanahan. Hal tersebut termaktub dalam RUU tentang Pertanahan ini

“Melihat kasus pertanahan yang tidak bisa selesai oleh penerapan UU No.5 tahun 1960, sehingga kita mengusulkan di rancangan undang undang ini ada pengadilan pertanahan, kita juga melihat kepentingan negara perlu di sekuritisasi, makanya kita mengajukan lembaga pengelolaan tanah yang namanya Bank Tanah,” ujar Mardani. ■ qq/sf



Wakil Ketua Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera.
Foto: Kiki/HR

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera mengatakan, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanahan yang merupakan *Lex Specialis* dari Undang Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UU PA) disusun untuk memperkuat, menjawab, dan mengatasi berbagai permasalahan pertanahan, seperti masalah ketimpangan lahan, sengketa

Komisi II Serap Masukan RUU Pertanahan di Jambi

Anggota Komisi II DPR RI KRH. Henry Yosodiningrat berharap di akhir periode DPR RI periode 2014-2019 bisa mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanahan. Namun kendati tinggal beberapa minggu lagi periode ini berakhir, namun masih ada waktu jika masyarakat ingin memberikan masukan-masukan terhadap pembahasan.

“Kita melakukan sosialisasi ke provinsi-provinsi untuk mendapatkan masukan dari lapangan, terutama dari BPN (Badan Pertanahan Nasional) di daerah, karena mereka nantinya yang akan menjadi *user*,” ungkap Henry saat memimpin Komisi II DPR RI sosialisasi perkembangan pembahasan RUU Pertanahan dengan Kanwil BPN Provinsi Jambi dan BPN Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi, Senin (2/9).

Lebih lanjut Henry menyampaikan, selama pembahasan RUU Pertanahan ini, tidak ada isu krusial antara DPR RI dengan Pemerintah yang menjadi hambatan. Namun komunikasi saja yang belum menemukan titik temu. Ia mencontohkan terkait Bank Tanah dan Peradilan Tanah yang belum menemukan titik temu kedua pihak.

“Kita berharap ini bisa dikomunikasikan antara DPR RI dan Pemerintah, dan menemukan titik temu yang terbaik. Sehingga RUU Pertanahan ini bisa segera diselesaikan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ungkap politisi PDI-Perjuangan itu, sambil menjelaskan bahwa walaupun RUU Pertanahan merupakan usul inisiatif DPR RI, namun tetap menerima masukan-masukan dari Pemerintah.

“Setelah dalam proses pembahasan dan pertimbangan-pertimbangan serta masukan dari Pemerintah maupun

Mahkamah Agung, nampaknya masih perlu kita pertimbangkan untuk dimasukkan ke dalamnya. Mungkin nanti ada Undang-Undang tersendiri bagi peradilan tanah, atau bagaimana solusinya akan kita komunikasikan kembali dengan Pemerintah mana yang terbaik,” ujar legislator daerah pemilihan Lampung II itu.

Lebih lanjut Henry menambahkan, RUU Pertanahan dan UU Pokok Agraria nantinya akan berbeda, dimana UU Pokok Agraria merupakan UU yang pokok pada agraria atau bersifat *lex generalis*.

Sedangkan RUU Pertanahan merupakan *lex specialis*, jadi merupakan pelaksanaan dari UU Pokok Agraria. Tidak berarti UU Pokok Agraria tidak berlaku jika ada RUU Pertanahan, bahkan asas-asas atau prinsip-prinsip hukum itu tidak boleh bertentangan atau menabrak UU lainnya. ■ skr/si



Anggota Komisi II DPR RI KRH. Henry Yosodiningrat. Foto: Singgih/HR

Perang Terhadap Narkoba di Sumut Dinilai **Belum Efektif**

Anggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu menilai perang terhadap narkoba di Provinsi Sumatera Utara belum efektif. Hal itu terbukti dalam pernyataan jajaran Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumut bahwa masih ada 256 ribu warga Sumut yang terpapar oleh narkoba, mulai dari yang mencoba hingga kecanduan. Menurutnya penanganan terhadap jalur penyelundupan narkoba masih terbilang longgar.



POLA KOORDINASI DAN PENANGANAN TERHADAP SELURUH JALUR-JALUR YANG RAWAN TERHADAP PENYELUNDUPAN NARKOBA TERNYATA MASIH LONGGAR

“Perang terhadap narkoba yang selama ini digembar-gemborkan ternyata belum efektif. Pola koordinasi dan penanganan terhadap seluruh jalur-jalur yang rawan terhadap penyelundupan narkoba ternyata masih longgar,” ujar Masinton usai mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI dengan Kapolda Sumut, Kajati Sumut, Kanwil Kemenkumham Sumut, dan BNNP Sumut, di Mapolda Sumut, Medan, Sabtu (31/8).

Menurut politisi PDI-Perjuangan ini, tingginya masyarakat yang terpapar

narkoba ini harus menjadi perhatian serius para aparaturnya penegak hukum, baik BNN, Kepolisian, beserta institusi negara lainnya untuk melakukan upaya pencegahan. Termasuk di pintu masuk dari jalur-jalur tikus dan juga bandar-bandar narkoba yang masih beroperasi dari dalam lapas, serta masih adanya perlakuan istimewa terhadap bandar narkoba di dalam lapas.

Di sisi lain, legislator dipil DKI Jakarta II itu, selama ini memang selalu ada masalah klasik mengenai *over capacity* di lapas terkait masalah narkoba. Menurut Masinton hal itu tidak bisa dijadikan alasan. Melibatkan seluruh aspek baik dari TNI AU, AD dan AL menurutnya merupakan salah satu cara untuk

mengurangi angka narkoba di Indonesia.

“Perang terhadap narkoba ini perlu dievaluasi kembali. Perlu ada koordinasi antar institusi penegak hukum yang sekarang, maupun pelibatan TNI baik itu AU, AD dan AL dalam aspek kita melawan narkoba. Dan kita mampu memerangi dari mulai pencegahan narkoba masuk ke Indonesia dan melibatkan seluruh aspek kelembagaan dan dengan dukungan anggaran yang cukup,” ujar Masinton. ■ eno/sf

Anggota Komisi III DPR RI
Masinton Pasaribu.
Foto: Kresno/HR



Penyuluh Pertanian Perlu Direvitalisasi

Anggota Komisi IV DPR RI Mindo Sianipar mengatakan, dalam menetapkan kebutuhan pupuk bagi petani di daerah, perlu pendampingan dan peran aktif penyuluh pertanian. Untuk itu Mindo meminta agar penyuluh direvitalisasi, guna memudahkan implementasi kartu tani dan pendistribusian pupuk sesuai kebutuhan tanaman.

“Jadi memang bertanam padi itu kelihatannya sederhana. Tapi terkait dengan itu, butuh banyak pengetahuan, butuh banyak penyuluhan,” kata Mindo usai mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Panja Kartu Tani Komisi IV DPR RI dalam rangka pengawasan pelaksanaan kebijakan kartu tani di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (31/8).

Terkait permasalahan kartu tani yang serapannya masih rendah, Mindo memaklumi hal tersebut karena memang program ini masih terus dikembangkan dan butuh pembelajaran. Namun di samping itu, kartu tani ini sudah dirasakan manfaatnya diantaranya mampu menjamin ketersediaan pupuk dan tidak dialihkan pendistribusiannya.

”

JADI MEMANG BERTANAM PADI ITU KELIHATANNYA SEDERHANA. TAPI TERKAIT DENGAN ITU, BUTUH BANYAK PENGETAHUAN, BUTUH BANYAK PENYULUHAN

“Sudah saya katakan kartu tani ini bermanfaat. Saya kira sasarannya pun sudah betul. Memang belum seperti yang kita harapkan *start*-nya. Dibutuhkan pembelajaran baik kepada petani, kepada penyalur distribusi, maupun kepada penyuluh sehingga ke depan saya yakin akan bertambah serapannya,” harap politisi F-PDI Perjuangan ini.

Selain itu, Mindo juga menekankan pentingnya sinergi antar *stakeholder* dalam mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan, tidak hanya

ditentukan di Kementerian Pertanian saja. Menurutnya dalam keberhasilan pertanian Indonesia, peran Kementan tak lebih dari 50 persen. Selebihnya ada campur tangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam pembuatan irigasi, Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) juga berperan dalam sektor pembiayaan dan lainnya.

“Coba yang *ngurusin* air siapa? Kementerian PUPR. Tanpa air bisa *enggak* bertanam? *ndak* bisa. Kemudian masalah biayanya, kebutuhan dana untuk kebutuhan petani baik sendiri sendiri maupun berkelompok, terkait bunga bank dan sebagainya. Jadi banyak hal yang harus dirembuk bersama. Ya saya yakin kita bisa mengejar kebutuhan kita oleh kita sendiri,” pungkas legislator dapil Jawa Timur VIII itu. ■ *es/sf*



Anggota Komisi IV DPR RI Mindo Sianipar. Foto: Erman/HR

Komisi V Dukung Revitalisasi Angkutan Penumpang Babel

Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis mendukung permintaan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) untuk merevitalisasi atau menghidupkan lagi operasional angkutan penumpang berupa kapal laut sebagai alternatif bagi penumpang dari Jakarta ke Babel maupun sebaliknya. Pasalnya, kapal penumpang ini bisa menjadi alternatif transportasi laut, dengan tarif yang lebih terjangkau bagi masyarakat.

“Hal ini juga sebagai tindak lanjut kunjungan DPRD Provinsi Babel ke Komisi V DPR beberapa waktu lalu,” imbuh Fary saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI meninjau kondisi dan kelayakan Pelabuhan Pangkalbalam untuk mengoptimalkan operasional kapal penumpang jenis *roll on-roll off* (roro) dan kapal cepat di Pangkal Pinang, Babel, Jumat (30/8).

Politisi Partai Gerindra ini menjelaskan jika tiket pesawat udara mengalami kenaikan, maka masyarakat bisa menggunakan transportasi laut yang lebih terjangkau sebagai solusi alternatif. Komisi V DPR RI juga telah mendengar-komitmen dari PT. Pelni dan ASDP untuk menghidupkan lagi transportasi laut ini. “Semua sudah ada, tinggal bagaimana meningkatkan frekuensi kapal penumpang ini,” kata Fary.

Ia menambahkan, selama ini kapal-kapal ro-ro yang memuat barang kelon-tongan dan kendaraan dari Jakarta ke Babel sudah cukup banyak. Sementara, muatan kapal dari Babel ke Jakarta masih banyak yang kosong, sehingga dapat

merugikan perusahaan pelayaran. “Kita berharap kapal-kapal dari Babel ke Jakarta untuk dimuat juga barang-barang produksi, sehingga frekuensi lalu lintas kapal akan lebih optimal,” tandas legislator dapil NTT II ini.

Sementara itu, Wakil Gubernur Bangka Belitung Abdul Fatah mengungkapkan terjadi pendangkalan di alur Pelabuhan Pangkalbalam akibat penambangan di masa lalu. Sehingga diperlukan pengerukan dan revitalisasi pelabuhan untuk mendukung pengoperasian kapal ro-ro.

Ia juga menerima banyak keluhan para pelaku UMKM akibat kenaikan tarif angkutan udara terhadap menurunnya omset. Usulan riil masyarakat Babel agar harga tiket pesawat diturunkan.

“Pertumbuhan pariwisata juga

ikut terdampak akibat kenaikan tarif angkutan udara,” ujarnya saat pertemuan dengan Tim Kunspek Komisi V DPR RI.

Ia menambahkan, “Kapal laut menjadi salah satu solusi transportasi alternatif dengan tarif terjangkau untuk menghubungkan Babel ke Jakarta maupun provinsi lain,” pungkas Wagub Babel.

Turut dalam Kunspek Komisi V DPR RI ini, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Anton Sukartono Suratno (F-PD), dan Anggota Komisi V DPR RI Henky Kurniadi (F-PDIP), Saniatul Lativa (F-PG), Bambang Haryo Soekartono (F-Gerindra), Subarna (F-Gerindra), Jhoni Allen Marbun (F-PD), Hanna Gayatri (F-PAN), Neng Eem Marhamah (F-PKB), Nurhasan Zaidi (F-PKS) dan Sahat Silaban (F-NasDem). ■ oji/sf



Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI meninjau Pelabuhan Pangkalbalam di Pangkal Pinang. Foto: Oji/HR



Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI meninjau Pelabuhan Penyeberangan Kendari-Langara, Konkep, Sultra. Foto: Gerald/HR

Infrastruktur Pelabuhan Kendari–Langara **Perlu Perbaiki**

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ibnu Munzir menilai Terminal Puuwatu dan Pelabuhan penyeberangan Kendari-Langara di Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara masih belum memadai dan perlu segera dilakukan perbaikan. Padahal masyarakat setempat sangat membutuhkannya.

“Fasilitasnya harus segera diperbaiki. Kita tahu kondisi ini belum memadai dan tidak boleh dibiarkan berlama-lama,” ucap Ibnu saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI meninjau Pelabuhan Penyeberangan Kendari-Langara, Konkep, Sultra, Jumat (30/8).

”

**PELABUHAN
PENYEBERANGAN
KENDARI-LANGARA
SEGERA DIBENAH
SEPERTI PELABUHAN
PENYEBERANGAN
YANG ADA DI
WILAYAH INDONESIA.**

Politisi Partai Golkar ini berharap Pelabuhan Penyeberangan Kendari-Langara segera dibenahi seperti

pelabuhan penyeberangan yang ada di wilayah Indonesia. Ia juga melihat Terminal Puuwatu sudah tidak representatif lagi. Untuk itu terminal penghubung antar kabupaten serta provinsi itu akan dinaikkan statusnya menjadi tipe A.

“Kami melihat lahan Terminal Puuwatu sudah dialihkan ke pemerintah pusat, maka perlu segera perhatian pemerintah. Kunjungan Kerja Spesifik ini akan menjadi dasar dalam penetapan APBN tahun anggaran 2020 mendatang. Salah satunya kami fokus di Sultra untuk infrastruktur dan transportasi di darat dan laut,” tutupnya legislator dapil Sulawesi Barat itu. ■ **opi/sf**

Kelistrikan Bali Berpotensi Defisit



Tim Kunspek Komisi VII DPR RI meninjau PLTDG PT. Indonesia Power di Bali. Foto: Eko/HR

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Ridwan Hisjam mengungkapkan kondisi kelistrikan di Pulau Bali saat ini cukup aman. Namun diperkirakan mulai tahun 2021 Pulau Dewata berpotensi mengalami defisit listrik. Hal ini karena makin pesatnya perkembangan industri pariwisata dan tata kota, sehingga kebutuhan energi listrik di Bali pun meningkat dengan pesat.

“Jumlah pelanggan yang terus meningkat tidak dibarengi dengan pengembangan pembangkit listrik. Sampai saat ini, sebagian besar energi listrik yang digunakan di Bali berasal dari pembangkit listrik di Jawa,” ungkap usai memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI meninjau Pusat Listrik Tenaga Diesel & Gas (PLTDG) PT. Indonesia Power di

Pasanggaran, Denpasar, Bali, Jumat (30/8).

Permasalahan kelistrikan Pulau Jawa sampai saat ini masih terdapat daerah yang belum bisa menikmati fasilitas listrik dari PLN, atau dengan kata lain Jawa pun masih memerlukan energi listrik yang besar. Bali sampai saat ini menjadi prioritas karena merupakan daerah tujuan pariwisata, dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dibandingkan daerah lainnya.

“Sebagai salah satu daerah tujuan pariwisata dunia, idealnya Bali sebagai mukanya Indonesia harus sudah bisa memulai memanfaatkan segala potensi energi lokalnya dengan membangun pembangkit listrik ramah lingkungan skala kecil, yang banyak yang tersebar di seluruh perumahan, hotel, villa, dan fasilitas-fasilitas penerangan jalan

lainnya,” urainya.

Sayangnya, lanjut politisi Partai Golkar itu, sampai saat ini PLN dan Pemerintah Daerah kurang tegas dalam mengatur ketentuan-ketentuan dan tata cara penggunaan energi alternatif seperti tenaga surya atau tenaga bayu. “Tanpa didukung langsung oleh pemerintah dan PLN, penggunaan energi alternatif di Bali akan tetap akan jalan di tempat,” jelasnya.

Mengacu data PT. PLN Distribusi Bali, saat ini daya mampu adalah 1.276,25 MW dan terjadi beban puncak nya adalah 904 MW sehingga *reserve margin*-nya adalah sebesar 29 persen, oleh karena itu hal ini bisa dikatakan pasokannya aman. Sedangkan diprediksi pada tahun 2021 beban listrik akan mencapai sekitar 1.041 megawatt (MW), dengan demikian hal ini sudah seharusnya dipikirkan dan diantisipasi.

Kebutuhan listrik itu pun 340 MW-nya berasal dari kabel bawah laut 150 kV Pulau Jawa. Hal ini akan menjadi problem tersendiri bilamana harus ada perbaikan jaringan atau perawatan, karena hal tersebut konsekuensinya adalah pemadaman secara bergilir sebagai akibat berkurangnya pasokan.

“Bali sepertinya akan alami masa-masa kritis, bila tidak segera dieksekusi menambah sumber pasokan listrik. Sebagai solusi jangka pendek, PLN lewat anak usahanya yaitu PT. Indonesia Power mengubah pembangkit berbahan bakar BBM dengan gas. Seperti misalnya, memindahkan *mobile power plant* di Lombok ke Bali atau *Marine Vessel Power Plant* dari Kupang untuk memperkuat pasokan Bali,” tutupnya.

Kunspek ini juga diikuti Wakil Komisi VII DPR RI Tamsil Linrung (F-PKS) dan Syaikhul Islam Ali (F-PKB), serta Anggota Komisi VII DPR RI Denny Jaya Abri Yani (F-PDI Perjuangan), Gandung Pardiman (F-Golkar), Ramson Siagian (F-Gerindra), Ihwan Datu Adam (F-Demokrat), Tjatur Sapto Edy (F-PAN), Peggi Patrisia Pattipi (F-PKB), Rofi' Munawar (F-PKS), Abdul Halim (F-PPP), Kurtubi (F-NasDem), dan Ferry Kase (F-Hanura). ■ rnm/sf

Komisi VII Minta Tol Pekanbaru–Dumai Perhatikan Tata Lingkungan

Komisi VII DPR RI meminta pelaksanaan pembangunan Jalan Tol Pekanbaru – Dumai memperhatikan tata lingkungan dan peraturan yang berlaku. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Muhammad Nasir mengatakan, pemerintah selaku pelaksana pembangunan, serta pihak-pihak terkait harus lebih memperhatikan dampak lingkungan hidup dan sosial yang diakibatkan kegiatan pembangunan, guna memperkuat perlindungan kepada lingkungan hidup.

“Kami minta semua belah pihak bisa menselaraskan proses ini supaya

berjalan dengan baik. Kami ingin tata lingkungan berjalan dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku,” katanya saat memimpin Tim Panja Limbah dan Lingkungan Komisi VII DPR RI meninjau pelaksanaan pembangunan jalan tol Pekanbaru – Dumai, Provinsi Riau, Jumat (30/8).

Perlu diketahui, berdasarkan informasi dari PT. Hutama Karya (Persero) selaku kontraktor menyebutkan, panjang Jalan Tol Pekanbaru – Dumai mencapai 128,9 km dan bersinggungan dengan Suaka Marga Satwa Balai Raja pada Seksi 4. Desain perlintasan sesuai Berita Acara Pleno Pembahasan

Persilangan Jalan Tol Ruas Pekanbaru–Dumai dengan jalur Satwa Gajah Sumatera tanggal 27 Mei 2019 antara BKSDA, Bina Marga, BPJT dan HK.

Kondisi lahan yang dilewati pembangunan jalan tol adalah lahan pertanian produktif, khususnya pertanian tanaman pangan, dengan beberapa kabupaten yang dilewati pembangunan jalan tol merupakan wilayah berbasis pertanian dengan produktifitas tinggi. Perubahan fungsi lahan yang sebelumnya berupa sawah, hutan, dan pemukiman menjadi jalan akan memengaruhi fungsi lahan tersebut dalam jangka panjang.

”

KAMI INGIN TATA LINGKUNGAN BERJALAN DENGAN BAIK SESUAI DENGAN ATURAN YANG BERLAKU

Kerusakan akses jalan sekitar lokasi pembangunan serta pencemaran yang muncul khususnya polusi udara juga dirasakan sangat mengganggu masyarakat sekitar lokasi pembangunan. Sebelumnya, Politisi Partai Demokrat ini menjelaskan kunjungan kerja spesifik ini untuk memastikan tentang tata ruang dan tata lingkungan dengan kondisi pembangunan Jalan Tol Pekanbaru – Dumai.

Untuk itu, Komisi VII DPR RI meminta seluruh sektor terkait untuk menjelaskan regulasinya, baik Amdal dan perizinan yang dimohonkan oleh pelaksana pembangunan jalan tol ini. “Kami minta seluruh penanggung jawab, baik Kementerian Kehutanan untuk perizinan maupun penegakan hukum dan seluruhnya. Kami akan memantau kembali bagaimana tentang izin-izin dan proses kawasan ini,” tegas legislator dapil Riau ini. ■ as/sf



Tim Panja Limbah dan Lingkungan Komisi VII DPR RI meninjau jalan tol Pekanbaru – Dumai, Riau. Foto: Agung/HR

UU Peksos Berikan Kepastian Hukum Profesi Pekerjaan Sosial

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menyatakan usai disahkannya Rancangan Undang-Undang Pekerja Sosial (RUU Peksos) sebagai Undang-Undang (UU), regulasi ini akan membawa kepastian hukum terhadap profesi pekerjaan sosial dalam melaksanakan tugasnya, dimana pekerja sosial akan turut mendapat legalitas dan perlindungan negara dari berbagai masalah yang selama ini kerap terjadi di sektor pekerjaan sosial.

Menurut Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Peksos ini, kehadiran UU Peksos akan turut mendorong profesi pekerja sosial menjadi profesi yang profesional. “Pekerja sosial akan didorong menjadi profesi yang profesional dengan pendidikan yang memenuhi standar-standar yang ada di

dalam standar praktik pekerjaan sosial,” ungkap Ace usai menerima Konsorsium Pekerja Sosial Indonesia (KPSI) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (3/9).

Legislator Partai Golkar ini berharap dengan diberlakukannya UU Peksos serta adanya tindak lanjut penerapan UU Peksos oleh Pemerintah akan membawa perubahan positif di sektor pekerjaan sosial, khususnya menyangkut aspek organisasi, hak dan tanggungjawab pekerja sosial, perlindungan hukum, standar kompetensi, dan lainnya. Termasuk registrasi bagi pekerja sosial asing yang berada di wilayah Indonesia.

“Kita tahu banyak juga para pekerja sosial asing yang berada di Indonesia. Dengan diberlakukannya UU ini, maka dengan sendirinya mereka harus



Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily. Foto: Runi/HR

segera melakukan registrasi dan bisa mengadopsi para pekerja sosial Indonesia yang memang sekarang ini sudah mulai sejajar dengan para pekerja sosial lainnya dalam menghadapi persaingan global saat ini,” pungkas legislator dapil Banten I tersebut. ■ *srw/sf*

Rencana Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Bebani Rakyat

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari menyampaikan, jangan sampai kenaikan iuran premi BPJS Kesehatan membebani rakyat. Ia menyarankan agar Pemerintah mempertimbangkan kembali terkait kenaikan iuran, dengan alasan sebagian besar peserta BPJS Kesehatan masih hidup pas-pasan, sehingga dikhawatirkan tidak melanjutkan kepesertaanya.

“Pendapatan masyarakat kita belum cukup secara umum. Jangan sampai peningkatan premi yang terlalu tinggi justru akan menyebabkan *drop out* peserta lebih besar,” ungkapnya usai Rapat Gabungan Komisi IX DPR RI dan Komisi XI DPR RI dengan Pemerintah membahas tindak lanjut hasil audit Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan oleh BPKP, di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (2/9).

Meskipun ada kenaikan premi

BPJS Kesehatan, Anggota Dewan dari Fraksi Partai Gerindra ini mengingatkan pemerintah agar dilakukan secara bertahap. Ia juga mengusulkan agar pembayaran iuran BPJS Kesehatan harus diikuti dengan peningkatan kualitas layanan di fasilitas kesehatan (Faskes).

Selain itu, pasien BPJS juga tidak boleh dipersulit lagi dalam mendapatkan hak pengobatan atau pelayanan yang memadai di semua jenjang Faskes. “Harus linear dengan peningkatan layanan, jangan sampai ada lagi pasien antri, dan mendapat perlakuan diskriminasi, apalagi ditolak dengan alasan rumah sakit penuh,” tandas Putih.

Dalam rapat tersebut, Komisi IX DPR RI dan Komisi XI DPR RI juga mendesak Kementerian Kesehatan RI untuk secara terus menerus memperbaiki sistem pelayanan kesehatan termasuk pemenuhan infrastruktur dan SDM

kesehatan untuk mendukung *supply side* program JKN.

Menurut Putih sinkronisasi regulasi BPJS Kesehatan juga perlu dilakukan. “Jangan sampai pemerintah justru mencederai hati rakyat dengan aturan terkait peningkatan tunjangan Direksi BPJS Kesehatan, padahal kondisi keuangannya defisit yang mana salah satu penyebabnya kinerja BPJS Kesehatan yang belum optimal,” ujarnya. ■ *eko/sf*



Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari. Foto: Andri/HR

Komisi X Setujui Anggaran Kemenpar TA 2020

Komisi X DPR RI menyetujui usulan pagu anggaran Kementerian Pariwisata RI dalam RAPBN Tahun Anggaran (TA) 2020 sebesar Rp 4,337 triliun dan menyetujui pagu anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) penugasan pariwisata 2020 sebesar Rp 1,287 triliun. Pagu anggaran Kemenpar mengalami kenaikan Rp 350 miliar yang dialokasikan untuk satuan kerja Badan Otorita Pariwisata Danau Toba, Borobudur, dan Labuan Bajo.

Oleh karena itu, destinasi pariwisata di tiga daerah tersebut harus lebih berkembang. Demikian diungkapkan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra saat memimpin Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Pariwisata RI Arief Yahya beserta jajaran, guna membahas pagu anggaran Kemenpar dalam RAPBN TA 2020 di Ruang Rapat Komisi X DPR RI, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (3/9).

“Terhadap pagu anggaran Kementerian Pariwisata RI pada RAPBN TA 2020, kami menyampaikan catatan agar Kemenpar melakukan koordinasi lebih intensif dengan Kementerian dan Lembaga lain, seperti Kementerian PUPR, Kemenhub, Kementerian LHK, Kemendes PDT dan Transmigrasi, Kementerian Koperasi dan UKM, Kemenristekdikti,

Kemendikbud, dan Bekraf untuk pengembangan 5 destinasi super prioritas, yaitu Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang,” ungkap politisi F-Gerindra itu.

Sementara terkait DAK, pihaknya meminta Kemenpar melakukan evaluasi terhadap implementasi dan capaiannya, agar alokasi DAK tersebut sesuai kebutuhan daerah. Oleh karena itu diperlukan petunjuk pelaksana (jultak) dan petunjuk teknis (juknis) lintas kementerian. Selain itu, Komisi X DPR RI juga mendorong Kemenpar untuk terus meningkatkan pengelolaan 10 destinasi pariwisata prioritas (10 Bali baru) yaitu Danau Toba, Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Kepulauan Seribu, Borobudur, Bromo Tengger Semeru, Mandalika, Labuan Bajo, Wakatobi, dan Morotai.

Untuk itu, Komisi X DPR RI meminta Kemenpar mengkaji dan mengevaluasi

permasalahan akses pariwisata dalam bentuk akases penerbangan seperti mahalnya harga tiket serta meningkatkan sosialisasi untuk memperkuat pemahaman program-program strategi Kemenpar. “Selain itu, peran Kemenpar untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) juga perlu dievaluasi, agar pada tahun 2020 sektor pariwisata menjadi top 2 penghasil devisa terbesar di Indonesia,” tutup Sutan. ■ rnm/sf

Wakil Ketua
Komisi X DPR RI
Sutan Adil Hendra.
Foto: Andri/HR



DPR Desak Pemerintah Atasi Defisit DJS Kesehatan 2019

Rapat Gabungan Komisi IX DPR RI dan Komisi XI DPR RI dengan Pemerintah membahas tindak lanjut hasil audit Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan oleh BPKP. Dalam rapat ini DPR RI mendesak Pemerintah agar mampu mengatasi defisit DJS Kesehatan tahun 2019 yang diproyeksikan mencapai Rp 32,84 triliun.

Rapat bersama yang digelar di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (2/9) ini juga mendiskusikan *grand design* dan peta jalan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tahun 2019-2024, termasuk inovasi pelayanan dalam rangka menjamin keberlangsungan JKN.

“Komisi IX DPR RI dan Komisi XI DPR RI mendesak Pemerintah untuk segera mengambil kebijakan untuk mengatasi defisit Dana Jaminan Sosial kesehatan tahun 2019 yang diproyeksikan mencapai Rp 32,84 triliun,” papar Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Soepriyatno saat membacakan kesimpulan rapat yang disusun bersama Pemerintah.

Rapat ini dipimpin bersama Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Dewi Asmara, sementara dari Pemerintah diwakili Kementerian Koordinator Bidang PMK, Menteri Kesehatan, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, Menteri Sosial, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional dan Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris.

Selain itu, Komisi IX DPR RI dan Komisi XI DPR RI menolak rencana Pemerintah untuk menaikkan premi JKN untuk Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) kelas III, sampai Pemerintah menyelesaikan data *cleansing*. Selain itu DPR RI juga



Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Soepriyatno dan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Dewi Asmara. Foto: Andri/HR

”

DPR MENDESAK PEMERINTAH UNTUK SEGERA MENGAMBIL KEBIJAKAN UNTUK MENGATASI DEFISIT DANA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN TAHUN 2019

mendesak Pemerintah untuk mencari cara lain dalam menanggulangi defisit DJS Kesehatan.

Dan yang tak kalah penting, DPR RI mendesak Pemerintah untuk segera memperbaiki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagai basis dari data terpadu penentuan Penerima Bantuan Iuran (PBI) program JKN. Perbaikan ini termasuk penyelesaian data *cleansing* terhadap sisa data dari hasil Audit dengan Tujuan Tertentu DJS Kesehatan tahun 2018 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebanyak 10.654.530 peserta JKN yang masih bermasalah. ■ eko/sf

Baleg Pantau Relevansi Implementasi UU Sisdiknas di Sumut

Tim Kunjungan Kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Baleg Sudiro Asno menggelar pertemuan dengan jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara serta *stakeholder* lainnya guna memantau relevansi implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang dilaksanakan di Sumut.

Sudiro mengatakan, Baleg sangat merespon pidato kenegaraan yang disampaikan Presiden pada tanggal 16 Agustus 2019 yang lalu, khususnya hal yang terkait dengan tema pembangunan lima tahun kedepan, yakni membangun sumber daya manusia Indonesia unggul, dan terus melanjutkan pembangunan infrastruktur.

“Untuk itu kita merespon dengan memantau bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dan juga undang-undang lainnya dilaksanakan, serta apakah masih relevan untuk diterapkan dengan situasi dan kondisi yang ada saat ini,” ucap Sudiro, di Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Utara, Medan, Kamis (29/8).

Disamping ingin menciptakan manusia unggul di bidang teknologi, ilmu pengetahuan dan bidang yang berkaitan dengan keahlian, sambung Sudiro, perlu juga dibarengi dengan bagaimana melahirkan manusia-manusia Indonesia yang mempunyai karakter yang kuat tentang Indonesia, yakni yang dijiwai oleh semangat karakter moral Pancasila.

“Kami mendapat masukan dari para *stakeholder* yang ada di Sumatera Utara ini, dan memang standar serta antisipasi yang kami inginkan sudah sejalan. Dimana telah ada gerakan penguatan pendidikan karakter, gerakan sekolah cerdas bermartabat, dan juga modernisasi manajemen pelayanan pendidikan,” ujar Politisi Fraksi Partai Hanura itu.

Sudiro menyatakan, seharusnya Provinsi Sumatera Utara bisa didorong untuk dijadikan percontohan bagi daerah lainnya. Salah satu keberhasilan yang telah dilakukan yakni telah dilakukannya sertifikasi guru dan mengenai dana

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang laporan penggunaannya bisa dipertanggungjawabkan.

Ia menjelaskan, dari *stakeholder* yang hadir dalam pertemuan tersebut, banyak yang menyampaikan tentang perlunya dimasukkan lagi mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) ke dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah.

“Terkait relevansi dari implementasi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, memang perlu dilihat lagi pasal-pasal mana saja yang perlu di kuatkan konten-konten atau muatan - muatan yang ada,” pungkas politisi dapil Jawa Barat VIII itu. ■ dep/es



Wakil Ketua Baleg Sudiro Asno. Foto: Devi/HR



Anggota Baleg DPR RI Martri Agoeng. Foto: Hendra/HR

Banyak Masukan Untuk Revisi UU Sisdiknas

terobosan dalam rangka menjalankan amanat UU tersebut.

Namun saat pertemuan Tim Kunjungan Kerja Baleg DPR RI dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Timur serta *stakeholder* bidang pendidikan, ia menerima masukan dari berbagai pihak kepada DPR RI untuk segera melakukan revisi terhadap UU Sisdiknas tersebut. Ia pun menerima aspirasi tersebut dan akan menyampaikannya kepada Komisi X DPR RI sebagai *leading sector* UU Sisdiknas.

“Kalau kita lihat laporan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sudah banyak terobosan-terobosan dalam pelaksanaan UU Sisdiknas ini, dan terobosan yang baik, Walaupun belum tertampung dalam norma UU, semoga nanti di dalam proses revisi UU itu bisa dimasukkan. Sehingga akan memperbaiki secara

kualitas maupun kuantitas pendidikan kita,” ujar Martri usai rapat Baleg DPR RI dengan Sekda Jatim, di Kantor Gubernur Jatim, Kamis, (29/8).

Dalam pertemuan tersebut, politisi PKS itu membahaskan, Baleg juga menerima masukan dari berbagai pihak seperti akademisi dan guru terkait disharmoni UU Sisdiknas dengan peraturan lainnya. Sehingga ini menjadi bahan masukan bagi DPR RI untuk segera melakukan penyesuaian. Begitupun dengan beberapa pasal yang sudah dibatalkan Mahkamah Konstitusi.

“Dalam proses implementasinya juga terjadi banyak disharmoni atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Masukan-masukan yang diberikan melalui Pemerintah Jawa Timur itu menjadi bahan dalam pertimbangan berikutnya. Sekarang pun sudah ada beberapa pasal yang dibatalkan Mahkamah Konstitusi dan mau tidak mau itu harus direvisi terhadap undang-undang ini,” jelas legislator dapil Jawa Tengah IV itu. ■ hs/sf

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Martri Agoeng menilai Pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah sangat baik dalam melakukan implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Ia pun memberikan apresiasi, karena Pemprov Jawa Timur sudah banyak melakukan terobosan-

Subsidi Elpiji 3 Kg Harus Tepat Sasaran

Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menegaskan, penyaluran subsidi elpiji 3 kilogram (KG) harus tepat sasaran. Pasalnya, direncanakan subsidi elpiji 3 kg pada

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2020 mencapai Rp 51 triliun. Ia memastikan, DPR RI tidak akan menurunkan besaran subsidi, namun DPR RI menginginkan subsidi tepat sasaran.

“Yang penting subsidiya tepat sasaran,” tegas Said saat Rapat Kerja Banggar DPR RI dengan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara dan Pelaksana tugas (Plt) Direktur Jenderal (Dirjen) Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Djoko Siswanto di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (3/9).

Namun politisi PDI-Perjuangan itu meminta kepada Pemerintah untuk memberikan basis data jumlah kepala keluarga, sehingga keputusan subsidi ini bisa transparan dan bertanggung jawab. Karena setelah ia hitung, jika subsidi elpiji tabung 3 kg saat ini dengan anggaran mencapai Rp 51,96

triliun, maka hampir 250 juta orang yang menikmati subsidi tersebut.

“Kalau saya hitung, kalau betul yang diperlukan subsidi elpiji tabung 3 kg saat ini Rp 51,96 triliun itu meniscayakan yang disubsidi itu hampir 85 juta kepala keluarga (KK). Sebanyak 85 juta KK kali 4 itu 250 juta orang yang disubsidi. Basis datanya berapa? Ini sudah empat tahun kita peringatkan pemerintah,” tandas legislator dapil Jawa Timur XI itu.

Diketahui, Banggar DPR RI bersama Pemerintah menyetujui besaran subsidi energi sebesar Rp 124,9 triliun untuk RAPBN 2020. Besaran subsidi energi ini lebih rendah dibandingkan proyeksi 2019 yang mencapai Rp 142,6 triliun maupun besaran dalam APBN 2019 yang sebesar Rp 159,97 triliun. Besaran subsidi ini pun lebih rendah dari usulan pada RAPBN 2020 awal yang sebesar Rp 137,5 triliun. ■ gre,dia/sf



Wakil Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah. Foto: Azka/HR

Parlemen Remaja Ajarkan Pendidikan Politik bagi Generasi Muda



Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar. Foto: Kresno/HR

DPR RI berkomitmen penuh dalam memberdayakan generasi muda sebagai salah satu pemangku kepentingan yang menentukan arah masa depan bangsa. Penyelenggaraan kegiatan Parlemen Remaja tingkat SMA/SMK/MA tahun 2019 merupakan wujud pemenuhan amanat DPR RI, yakni berperan aktif mengajarkan pendidikan politik sejak dini kepada generasi muda.

“Hal ini dilakukan dalam rangka mendorong partisipasi generasi muda di setiap lini keputusan yang menjadi esensi demokrasi,” ucap Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar saat membuka acara Parlemen Remaja Tingkat SMA/SMK/MA tahun 2019

di Wisma Griya Sabha Kopo DPR RI, Bogor, Jawa Barat, Senin (2/9).

Indra berharap, seluruh peserta nantinya dapat mengeksplorasi segala potensi dan rasa keingintahuannya dalam kegiatan tersebut. “Gunakan kesempatan berharga ini dengan sebaik-baiknya untuk mengenal lebih dekat hakikat kebangsaan, perkembangan demokrasi di Indonesia, fungsi-fungsi dan peranan DPR bagi NKRI, serta peran generasi muda sebagai partisipator dalam proses pengambilan keputusan yang menentukan masa depan bangsa,” tuturnya.

Dengan mengikuti semua rangkaian kegiatan Parlemen Remaja, sambung Indra, seluruh peserta Parlemen Remaja 2019 diharapkan mampu menyerap ilmu dan mengasah kemampuan menganalisa masalah dan merumuskan solusi dalam kerangka demokrasi yang mengedepankan musyawarah dan mufakat.

Adapun tema yang diangkat dalam kegiatan Parlemen Remaja 2019 ini adalah ‘Remaja Peduli Lingkungan. Cinta Bumi Cinta Lingkungan’. Tema ini diangkat seiring meningkatnya persoalan lingkungan yang terkait dengan pengelolaan sampah oleh masyarakat.

“Saya menilai, tema yang diusung dalam kegiatan Parlemen Remaja tahun 2019 ini yaitu bukan sebagai sesuatu yang hanya mengikuti tren belaka, akan tetapi ancaman yang berkaitan dengan pengolahan sampah sudah sangat nyata di depan mata. Padahal saat ini Indonesia sudah memiliki Undang-Undang tentang Pengelolaan Sampah, yaitu UU Nomor

18 Tahun 2008,” jelas Indra.

Terkait kegiatan acara Parlemen Remaja tahun 2019, Indra mengatakan, para peserta Parlemen Remaja yang terpilih adalah mereka yang telah memenuhi kriteria dan telah sesuai dengan yang diinginkan. Dari jumlah 11 ribu lebih pendaftar Parlemen Remaja 2019 dari seluruh Indonesia, akhirnya terpilih 128 peserta.

“Para peserta Parlemen Remaja 2019 yang terpilih merupakan wakil dari seluruh daerah pemilihan yang ada di Indonesia. Kegiatan Parlemen Remaja 2019 hadir dengan wajah kebhinekaan Indonesia. Hal itu sangat membanggakan dan menunjukkan betapa kebhinekaan yang ada merupakan kekayaan yang memang dimiliki oleh Bangsa Indonesia,” tandasnya.

Ia menyatakan, peserta Parlemen Remaja adalah generasi milenial yang memiliki karakter *open minded*, kreatif, dan fleksibel. Oleh sebab itu, gunakan seluruh potensi yang dimiliki untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif dan bermanfaat bagi orang lain.

“Ambilah peran dalam membangun bangsa ini dengan melakukan hal-hal yang baik, terus bekerja keras dan serius. Kesuksesan terjadi karena persiapan, kerja keras, konsisten, dan mau belajar dari kegagalan,” tegasnya.

Turut hadir dalam pembukaan Parlemen Remaja 2019, diantaranya Deputi Persidangan Damayanti, Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Y.O.I Tahapary, Kepala Bagian Humas Minarni, dan sejumlah pejabat lainnya di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. ■ dep/sf

Parlemen Dunia Sebagai Katalisator Utama Pencapaian SDGs 2030

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf optimis, melalui tema besar “*Combating inequality through Social and Financial Inclusion*” yang diusung World Parliamentary Forum on Sustainable Development (WPFSD) ketiga, peran parlemen dalam mengawasi pemerintahan untuk mencapai *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dapat menjadi katalisator utama dalam pencapaian TPB tahun 2030.

“Saya optimis bahwa peran parlemen akan menjadi katalis utama untuk mencapai agenda pembangunan global. Tantangan itu tetap penting bagi Negara kita, serta untuk seluruh dunia, oleh karena itu kita harus bekerja sama untuk mencapai TBB pada tahun 2030,” ungkap legislator Partai Demokrat ini dalam pidato pembukaan WPFSD 2019 di hadapan 150 delegasi parlemen dari 28 negara, di Bandung, Bali, Rabu (4/9).

Terdapat 3 sesi sidang pleno dalam forum yang resmi dibuka oleh Ketua DPR RI Bambang Soesatyo ini, diantaranya: ‘Bagaimana Infrastruktur Dan Inovasi Industri Dapat Meningkatkan Peluang Yang Sama’, kemudian ‘Menjamin Akses Pedesaan Untuk Bersih Pasokan Air, Sanitasi dan Kebersihan’, serta ‘Meningkatkan Kemitraan Terhadap Keuangan Inklusif’.

Adapun yang akan menjadi pengisi acara dalam ketiga sesi pleno tersebut, diantaranya berasal dari perwakilan Inter-Parlemen Union (IPU), Women Political Leaders (WPL), Geneva Council for International Affairs and

Development (GCIAD), United Nations Environment Programme (UNEP), dan United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP).

Nurhayati juga menyampaikan bahwa meningkatnya ketidaksetaraan menjadi salah satu kemunduran besar dalam mencapai TPB yang dapat mencegah sebuah bangsa, masyarakat, individu untuk berkembang. Selain itu ketidakstabilan ekonomi, adanya kohesi sosial, dan terhambatnya tindakan iklim menjadi fenomena global yang perlu ditangani melalui kemitraan multi *stakeholders* dari semua negara.

“Skala masalah SDGs adalah untuk menyelesaikan tantangan yang kerap terjadi. Sementara itu, dengan hanya 11 tahun yang tersisa untuk mencapai target SDGs 2030, kami mendesak adanya tindakan nyata melalui

kemitraan multi *stakeholder* sebagai kunci pencapaian SDGs,” tambah Anggota Komisi XI DPR RI itu.

Nurhayati memastikan, dalam akhir pertemuan nanti, WPFSD akan mengadopsi dokumen hasil akhir sebagai bentuk aktualisasi komitmen pembangunan bersama ke dalam bentuk tindakan konkret yang menggarisbawahi pendekatan multi sektoral untuk memberikan perspektif baru dalam membantu perubahan agenda kebijakan pemerintah.

“Oleh karena itu, saya mendorong semua delegasi dalam forum ini secara aktif dan secara konstruktif dalam diskusi kami, untuk mendukung dokumen hasil akhir, yang saya percaya akan dapat memperkuat upaya kita semua dalam capaian agenda perkembangan SDGs 2030,” tutup legislator dapil Jawa Timur V itu. ■ alw/sf



Ketua BKSAP DPR RI Nurhayati Ali Assegaf. Foto: Oji/HR

Seni Rupa Bagian Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Indonesia

Seni rupa adalah sisi yang tidak pernah bisa dipisahkan dari perjuangan Kemerdekaan Indonesia. Saat Proklamasi Kemerdekaan dibacakan di Jl. Pengangsaan Timur Nomor 56 pada 74 tahun silam atau tepatnya pada 17 Agustus 1945, terdapat sebuah lukisan berukuran 152x152 cm bernama lukisan “Memanah” yang menjadi saksi bisu peristiwa bersejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tak hanya itu, 28 hari setelah Indonesia Merdeka, tepatnya pada tanggal 14 September 1945 lukisan ini kembali digunakan sebagai latar belakang pada acara konferensi pers perdana bagi Bangsa Indonesia yang baru saja merdeka di hadapan pers nasional dan asing. Demikian disampaikan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, saat membuka Pameran Seni Rupa “Kepada Republik #5 Tanah Air”, di selasar Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (3/9).

“Jika kita membaca ulang sejarah pembacaan teks Proklamasi yang dilakukan di depan lukisan ‘Memanah’ karya Henk Ngantung, hal itu bukanlah sebuah kebetulan melainkan dengan sengaja dirancang oleh Bung Karno karena ia menginginkan agar lukisan itu menjadi latar belakang teks pembacaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia,” ujar Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) itu.

Politisi Partai Gerindra ini pada kesempatan yang sama mengungkapkan, pada masa revolusi mempertahankan kemerdekaan Indonesia juga banyak para tokoh seniman pelukis perupa yang ikut



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon beserta Anggota DPR RI menuju Pameran “Kepada Republik”. Foto: Arief/HR

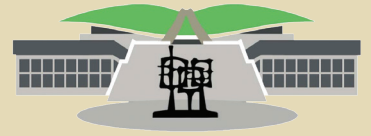
berjuang dengan cara berkesenian. Antara lain, dengan cara membuat poster-poster yang berisi pesan propaganda kemerdekaan pada masa itu. Salah satu karya yang terkenal dari para pejuang kesenian tersebut adalah lukisan ‘Ayo Bung’ karya Affandi.

Legislator dapil Jawa Barat V itu menutup sambutannya dengan menyampaikan DPR RI berharap melalui pameran ini *spirit* perjuangan para seniman di masa lalu dapat terus terpelihara. Dalam pameran-pameran terdahulu, DPR RI juga terus berusaha untuk mengganti para perupanya dari tahun ke tahun.

“Tujuannya, agar dapat menampilkan karya yang berbeda setiap tahunnya dengan karya dan

pendekatan masing-masing yang berbeda-beda dari setiap perupa. Ini juga komitmen DPR untuk menjadikan ruang-ruang yang ada di DPR ini menjadi ruang seni atau *art space*. Semakin banyak ruang seninya akan semakin bagus,” pungkas Fadli.

Acara dilanjutkan dengan peninjauan untuk memberikan apresiasi terhadap hasil karya-karya para perupa yang ditampilkan pada Pameran Seni Rupa “Kepada Republik #5 Tanah Air” oleh Fadli, dengan didampingi Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemi Francis (F-Gerindra), Anggota Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati (PDI-Perjuangan), dan Anggota Komisi V DPR RI Willem Wandik (F-Demokrat), serta para Duta Besar negara sahabat. ■ pun/sf



Ketua DPR Bambang Soesatyo menghadiri acara "Dudu Bacarita" yang diadakan oleh Aliansi Pemuda Maluku di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (6/9). Foto: Jaka/JK



Komisi IX DPR RI menyelenggarakan peluncuran buku putih mengenai "Keberlangsungan Program JKN dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional" di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (6/9). Foto: Gerald/JK



Ketua Biro Pemberitaan Parlemen Setjen dan BK DPR RI Y.O.I Tahapari memberikan penghargaan kepada lima peserta terbaik Parlemen Remaja 2019, dilanjutkan foto bersama dengan seluruh peserta Parlemen Remaja 2019. Foto: Kresno/SF

